

## **Peran Local Strongman dalam Hilirisasi Koalisi Partai pada Pemilihan Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2024**

**Justitia Adysti<sup>1</sup> Feni Rosalia<sup>2</sup>**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [adystijustitia@gmail.com](mailto:adystijustitia@gmail.com)<sup>1</sup> [fenirosalia@gmail.com](mailto:fenirosalia@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study analyzes the role of the local strongman in the downstreaming process of party coalitions in the 2024 Gubernatorial Election of Lampung Province, with a focus on a case study involving the coalition between the North Lampung regent candidate and the Lampung gubernatorial candidate. The phenomenon of party coalition downstreaming reflects a political support pattern that flows from the local to the provincial level within the context of electoral interests. This research adopts a qualitative approach, utilizing data collection techniques such as in-depth interviews, document analysis, and participatory observation. The findings reveal that the local strongman plays a strategic role as a connector among political actors, a driver of local party machinery, and a contextual campaign strategist. The coalition between Hamartoni and Rahmat Mirzani was formed not merely due to electoral requirements, but also due to pre-established networks of local power. These findings indicate that the success of coalitions in regional elections is significantly influenced by the capacity of local strongmen to integrate party structures, electoral bases, and the socio-political dynamics of the region.*

**Keywords:** Local Strongman, Coalition Downstreaming, Lampung Regional Election, Political Parties

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis peran *local strongman* dalam proses hilirisasi koalisi partai pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2024, dengan fokus pada studi kasus koalisi antara calon Bupati Lampung Utara, dan calon Gubernur Lampung. Fenomena hilirisasi koalisi partai menggambarkan pola dukungan politik yang mengalir dari tingkat lokal ke tingkat provinsi dalam kerangka kepentingan elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *local strongman* memainkan peran strategis sebagai penghubung antar aktor politik, penggerak mesin partai lokal, serta perancang strategi kemenangan yang kontekstual. Koalisi antara Hamartoni dan Rahmat Mirzani terbentuk tidak hanya karena syarat elektoral, tetapi juga karena jaringan kekuasaan lokal yang telah terbangun sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan koalisi dalam Pilkada sangat ditentukan oleh kemampuan *local strongman* dalam menyinergikan struktur partai, basis elektoral, dan dinamika sosial-politik daerah.

**Kata Kunci:** Local Strongman, Hilirisasi Koalisi, Pilkada Lampung, Partai Politik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

## **INTRODUCTION**

Pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, merupakan bagian dari dinamika politik yang kompleks dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Pilkada telah menjadi arena pertarungan kepentingan para oligarki untuk menancapkan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik (As'ad et al., 2023). Proses ini tidak terlepas dari kontestasi dan tarik-menarik kepentingan di antara elit politik, yang mencerminkan realitas oligarkis dalam praktik demokrasi lokal. Penerapan mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan asas demokrasi yang menjunjung partisipasi publik dalam proses pemerintahan daerah. Dalam konteks sistem

politik, partai politik keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam system politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang sedemikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan (*representative democracy*) baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara (Agung, 2018).

Ketentuan mengenai syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah telah diatur secara tegas dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam regulasi tersebut dinyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan pasangan calon apabila memenuhi ambang batas minimal dukungan, yakni memperoleh sekurang-kurangnya 20% dari total 85 kursi DPRD Provinsi Lampung atau 25% dari total suara sah dalam pemilu legislatif tingkat provinsi sebelumnya. Merujuk pada ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun partai politik yang mampu memenuhi syarat pengusungan calon secara mandiri pada Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2024. Kondisi ini mendorong terbentuknya koalisi antarpolitical politik, sebagai strategi politik untuk memenuhi ketentuan legal formal pencalonan. Koalisi pada khususnya merupakan aliansi atau kerja sama untuk periode waktu yang terbatas dalam rangka demi mencapai tujuan tertentu. Dalam politik, tujuan tersebut biasanya adalah mengambil-alih kekuasaan dan memegang pemerintahan. Koalisi yang dimaksud dalam hal ini adalah, antar kelompok atau antar organisasi, untuk mewujudkan tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendirian (Efriza, 2018).

Berdasarkan rekapitulasi perolehan kursi hasil pemilu legislatif terakhir, Partai Gerindra diprediksi menempati posisi dominan dengan memperoleh 16 kursi DPRD Provinsi Lampung, diikuti oleh PDI Perjuangan (13 kursi), PKB dan Golkar (masing-masing 11 kursi), NasDem (10 kursi), Partai Demokrat (9 kursi), PAN (8 kursi), dan PKS (7 kursi). Realitas distribusi kursi ini memperkuat argumen bahwa tidak satu pun partai memiliki kapasitas mayoritas absolut, sehingga pembentukan koalisi menjadi keharusan strategis dalam proses pencalonan kepala daerah. Berikut hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif seluruh partai politik pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2024:

**Table 1. Hasil Perolehan Suara 18 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2024**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Suara
1.	Partai Kebangkita Bangsa (PKB)	579.245 suara	12.45%
2.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	806.836 suara	17.34%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	724.522 suara	15.57%
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	670.414 suara	14.41%
5.	Partai NasDem	443.412 suara	9.53%
6.	Partai Buruh	27.738 suara	0.60%
7.	Partai Gelora	27.631 suara	0.59%
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	303.074 suara	6.52%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	6.701 suara	0.14%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	20.815 suara	0.45%
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	14.021 suara	0.30%
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	364.060 suara	7.83%
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	8.431 suara	0.18%
14.	Partai Demokrat	428.727 suara	9.22%
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	93.721 suara	2.01%
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	48.052 suara	1.03%
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	69.049 suara	1.48%
24.	Partai Ummat	15.393 suara	0.33%

Jika dilihat dari perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif seluruh partai politik yang melebihi ambang batas pada pemilu legislatif Provinsi Lampung 2014, tidak ada partai politik yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon Kepala Daerah usungan partainya sendiri hal ini dibuktikan dengan hasil perolehan suara sah dan jumlah kursi legislatif Provinsi Lampung 2014 sebagai berikut:

**Table 2. Hasil Perolehan Suara 12 Partai Politik pada Pemilu Legislatif Provinsi Lampung 2014**

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	Persentase Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	328.832 suara	26.84%
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	154.033 suara	12.57%
3.	Partai Demokrat	146.922 suara	11.99%
4.	Partai Demokrat	146.922 suara	11.99%
5.	Partai Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindra)	125.547 suara	10.24%
6.	Partai Nasdem	114.371 suara	9.33%
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	112.581 suara	9.19%
8.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68.421 suara	5.58%
9.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	30.016 suara	2.45%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27.247 suara	2.22%

Fenomena koalisi partai politik merupakan praktik yang lazim dalam sistem multipartai di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terjadi disebabkan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang mejemuk sehingga menjadi salah satu faktor pendorong institusionalisasi sistem multipartai (Pinem et al., 2024). Pertimbangan dalam membentuk koalisi dapat bersifat pragmatis maupun ideologis, tergantung pada strategi, kepentingan elektoral, dan konstelasi kekuatan politik masing-masing partai. Oleh karena itu, motif terbentuknya koalisi pun cenderung beragam, mulai dari upaya memenangkan kontestasi hingga memperluas pengaruh politik dalam pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, Provinsi Lampung melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2024–2029. Pemilihan ini diselenggarakan seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur petahana, Dr. (H.C.) Ir. H. Arinal Djunaidi, yang menjabat pada periode 2019–2024. Dalam menyongsong Pilkada tersebut, sejumlah kandidat telah mulai mendeklarasikan pencalonannya secara terbuka.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menganalisis strategi hilirisasi koalisi partai politik dalam konteks pemilihan Bupati dan Gubernur di Provinsi Lampung tahun 2024. Fokus perhatian diarahkan pada dinamika pencalonan pasangan calon Gubernur nomor urut 02, yaitu Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, yang merupakan figur baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Lampung. Kemunculan pasangan tersebut membawa konfigurasi politik baru, khususnya dalam kaitannya dengan terbentuknya koalisi dukungan dari pasangan calon Bupati Lampung Utara nomor urut 01, Hamartoni Ahadis–Romli. Koalisi ini dibentuk sebagai bagian dari strategi elektoral untuk memperkuat dukungan terhadap pasangan calon Gubernur nomor urut 02. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pola dan strategi hilirisasi koalisi partai politik, yang terwujud dalam keterkaitan antara koalisi dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) dan Pilgub (Pemilihan Gubernur). Fenomena ini memperlihatkan adanya integrasi strategi politik lintas wilayah dan tingkatan pemerintahan dalam upaya memenangkan pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung tahun 2024

## RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggambarkan sembah fenomena yang terjadi dilapangan untuk dijadikan obyek

riset. Metode penelitian deskriptif ini diharapkan dapat menggambarkan fenomena yang terjadi melalui pengamatan, wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang sesungguhnya terjadi. Metode pada penelitian ini bersifat eksploratif, intrepetatif, dan konstruktif yang dapat digunakan untuk menggali obyek secara lebih mendalam, sehingga dapat ditemukan potensi masalah dan hipotesis. Dalam penelitian ini model tinjauan pustaka digunakan untuk memastikan bahwa pengumpulan data dan informasi terpercaya dengan menggunakan tinjauan penelitian sebelumnya, data publik dan informasi yang terkait. Penggunaan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti dapat lebih mendapat penjelasan yang mendalam, rinci dan dapat dipahami secara umum, Kirk dan Miller dalam Moleong juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan secara fundamental dalam ilmu pengetahuan sosial karena sumber ilmu didapat dari pengamatan manusia, hasil dialog dan perluasan sebuah tema yang diteliti. Dengan demikian tujuan penelitian untuk memahami sebuah fenomena yang terjadi secara alami, dan mengaitkan dengan kondisi mutakhir ilmu pengetahuan.

## **RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION**

Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2024 menjadi momen strategis dalam kontestasi politik lokal. Hal ini tidak hanya karena akan berakhirnya masa jabatan Gubernur petahana Dr. (H.C) Ir. H. Arinal Djunaidi, tetapi juga karena munculnya figur-figur baru yang berpotensi mengubah peta politik lokal. Salah satu pasangan calon yang menarik perhatian publik adalah pasangan nomor urut 02 Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela yang merupakan figur baru dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Lampung. Kehadiran mereka memunculkan dinamika politik baru, termasuk terbentuknya jaringan koalisi lintas daerah yang bersifat strategis dan instrumental. Dalam konteks tersebut, koalisi politik antara calon Gubernur Rahmat Mirzani dengan calon Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis (nomor urut 01) dapat dilihat sebagai bagian dari strategi hilirisasi politik yang ditopang oleh peran local strongman. Hilirisasi politik dalam hal ini merujuk pada proses konsolidasi dukungan politik di tingkat lokal ke provinsi, yang melibatkan tokoh-tokoh lokal berpengaruh dalam mengarahkan opini publik, memobilisasi sumber daya politik, serta memperkuat basis elektoral calon yang mereka dukung.

*Local strongman* diartikan sebagai aktor politik lokal yang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan, kontrol terhadap jaringan birokrasi, partai politik, dan sumber daya sosial di daerahnya. *Local strongman* melakukan kontrol sosial dengan memanfaatkan komponen penting yang diyakini masyarakat sebagai strategi (Handoko et al., 2020). Mereka sering kali memegang peran ganda sebagai elite politik, pengusaha, dan tokoh masyarakat yang dapat mengonsolidasikan kekuatan politik di daerah pemilihannya. Hamartoni Ahadis, sebagai mantan birokrat tinggi di Provinsi Lampung dan kini calon Bupati Lampung Utara, dapat dikategorikan sebagai local strongman. Jejak kariernya dalam pemerintahan dan pengaruh sosial-politik yang dimilikinya memberikan kekuatan signifikan dalam proses negosiasi koalisi serta dalam mempengaruhi arah dukungan politik lokal terhadap calon Gubernur Lampung yang diusungnya. Konsep *local strongman* dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia merujuk pada aktor lokal yang memiliki kapasitas sumber daya politik, ekonomi, sosial, dan kultural yang cukup dominan untuk mempengaruhi jalannya proses politik lokal, baik secara formal maupun informal. Dalam studi ini, Hamartoni Ahadis memenuhi indikator sebagai local strongman berdasarkan *Pertama*, Kapabilitas administratif dan birokratik yang dimana selama menjabat sebagai Sekda, Hamartoni mengelola kebijakan strategis provinsi, dan dikenal dekat dengan elite partai dan tokoh adat di wilayah utara. *Kedua*, Koneksi ke elite nasional dan pengurus partai pusat: Hasil wawancara pada pengurus DPW PAN dan PKS Lampung



menunjukkan bahwa Hamartoni menjadi figur kunci dalam negosiasi koalisi, termasuk komunikasi intensif dengan DPP PAN dan PKS. *Ketiga*, Mobilisasi sumber daya sosial dimana Hamartoni diketahui memiliki jaringan ormas keagamaan, komunitas adat Abung, dan dukungan informal dari jaringan ASN Lampung Utara, yang menjadi kekuatan tak tertulis dalam membentuk opini publik.

Koalisi antara calon Bupati Hamartoni Ahadis dan calon Gubernur Rahmat Mirzani merupakan bentuk dari hilirisasi koalisi partai, yakni sebuah strategi sinergis untuk memperluas jangkauan elektoral dengan mengintegrasikan dukungan partai dan basis massa dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Dalam konteks Pilkada 2024, hal ini menjadi penting mengingat UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa partai atau gabungan partai yang dapat mengusung calon kepala daerah harus memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD (yakni 17 kursi dari total 85 di DPRD Provinsi Lampung) atau 25% suara sah. Berdasarkan data rekapitulasi kursi DPRD Provinsi Lampung 2024 (KPU Lampung), distribusi kursi diisi oleh Gerindra (16), PDIP (13), PKB (11), Golkar (11), NasDem (10), Demokrat (9), PAN (8), dan PKS (7). Tidak satu pun partai yang dapat mencalonkan gubernur secara tunggal. Ini mengharuskan terbentuknya koalisi antarpartai. Dalam hal ini, *local strongman* seperti Hamartoni Ahadis memainkan peran sebagai fasilitator koalisi, dengan memanfaatkan jaringan politiknya untuk menyatukan kekuatan partai-partai di tingkat lokal dan provinsi.

## Discussion

Peran Hamartoni Ahadis dalam mendukung Rahmat Mirzani menunjukkan strategi politik yang tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi substantif dan operasional. Beberapa aspek penting dari peran strategis yaitu *Pertama*, Konsolidasi Jaringan Politik hal ini menunjukkan Hamartoni memiliki kedekatan historis dan kultural dengan berbagai tokoh partai politik di Lampung Utara dan sekitarnya. Kemampuan ini digunakan untuk merangkul partai-partai non-pemerintah untuk bergabung dalam barisan koalisi mendukung calon Gubernur nomor urut 02. Koalisi ini didukung oleh partai-partai menengah seperti PAN, PKS, dan Demokrat yang secara bersama tidak mampu mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Dengan kekuatan agregat 26 kursi dari 85 di DPRD Provinsi Lampung (lihat Tabel 1: Komposisi Kursi DPRD Lampung Hasil Pemilu 2024), mereka memenuhi syarat 20% kursi untuk mendaftarkan pasangan calon gubernur.

*Kedua*, Mobilisasi Sumber Daya Politik, Pada kampanye politik, logistik dan infrastruktur merupakan elemen krusial. *Local strongman* seperti Hamartoni mampu memobilisasi sumber daya ekonomi, relawan, dan logistik kampanye di basis dukungan lokal untuk mendukung kemenangan calon gubernur koalisinya. *Ketiga*, Legitimasi Sosial dan Elektoral, Koalisi yang dibentuk bersama calon gubernur Rahmat Mirzani tidak hanya bertujuan memperkuat elektabilitas, tetapi juga memperluas legitimasi di mata pemilih. Dengan adanya figur seperti Hamartoni, pasangan nomor urut 02 memperoleh "*endorsement local*" yang memperkuat kepercayaan pemilih di wilayah utara Lampung. Hamartoni memiliki pengaruh elektoral yang kuat di Lampung Utara, sementara Rahmat Mirzani, sebagai pengusaha muda dan tokoh baru, dinilai mampu menggerakkan ceruk pemilih urban dan pemilih muda di wilayah Bandar Lampung dan Metro. *Keempat*, Koordinasi Program dan Visi Pemerintahan, Hilirisasi koalisi ini juga memuat komitmen terhadap keselarasan program pembangunan antara calon gubernur dan calon bupati. Ini menjadi faktor yang meyakinkan bagi pemilih bahwa pemerintahan ke depan akan bersifat sinergis dan kolaboratif.

Motif koalisi antara Hamartoni Ahadis dan Rahmat Mirzani Djausal tidak dapat dilepaskan dari konstelasi politik lokal yang khas di Provinsi Lampung, terutama di wilayah Lampung Utara yang memiliki sejarah kuat dalam pembentukan basis politik berbasis

patronase dan jaringan kekuasaan lokal. Hamartoni Ahadis, sebagai tokoh birokrat senior dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, memiliki jejaring yang luas di kalangan ASN, tokoh adat, serta elite lokal, sehingga secara de facto ia memainkan peran sebagai *local strongman*. Peran ini semakin signifikan karena Hamartoni tidak hanya memiliki kekuatan elektoral di Lampung Utara, tetapi juga daya tawar politik di tingkat provinsi.

Strategi ini sejalan dengan pendekatan *electoral coalition* yang dikemukakan oleh Strom dan Müller (1999), di mana koalisi tidak hanya dibentuk untuk tujuan ideologis, tetapi untuk memaksimalkan hasil elektoral dengan mempertimbangkan sumber daya politik dan kekuatan basis massa. Hilirisasi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada perpindahan dukungan dari tingkat lokal ke provinsi, tetapi juga pada transfer legitimasi politik. Dalam hal ini, Hamartoni sebagai *local strongman* menjadi *endorser* politik yang memperkuat daya terima kandidat gubernur kepada pemilih di wilayah utara yang sebelumnya kurang tersentuh oleh jaringan Rahmat Mirzani. Data dari survei LSI Lampung (rilis April 2025) memperlihatkan bahwa dukungan Rahmat Mirzani meningkat signifikan di Lampung Utara setelah adanya deklarasi koalisi dengan Hamartoni. Persentase elektabilitas naik dari 21,5% (Februari) menjadi 37,8% (April), dan Lampung Utara menjadi kantong suara strategis bagi pasangan nomor urut 2

## CONCLUSION

Fenomena koalisi partai dalam Pilkada Provinsi Lampung tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari dinamika peran aktor-aktor politik lokal, khususnya aktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur dan kultur politik daerah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh figur *local strongman*. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hilirisasi koalisi partai, peran *local strongman* menjadi faktor strategis dan determinan dalam membentuk, mengarahkan, dan memperkuat koalisi antar partai politik, terutama dalam kontestasi Pilkada yang menuntut konsolidasi lintas level antara kabupaten dan provinsi. Koalisi antara Hamartoni Ahadis, calon Bupati Lampung Utara, dan Rahmat Mirzani Djausal, calon Gubernur Lampung, mencerminkan praktik hilirisasi koalisi politik berbasis jaringan kekuasaan lokal yang memiliki akar kuat di masyarakat serta kemampuan untuk memobilisasi dukungan politik secara simultan di dua level pemilihan. Dalam hal ini, peran Hamartoni sebagai *local strongman* menjadi krusial dalam menjembatani kepentingan partai-partai menengah, menjamin stabilitas komunikasi politik antar elit lokal, serta menciptakan legitimasi elektoral bagi pasangan calon di tingkat provinsi.

Penelitian ini menemukan bahwa motif utama dari terbentuknya koalisi partai pada Pilgub Lampung 2024 bersifat instrumental dan strategis, yaitu dilandasi oleh kebutuhan untuk memenuhi syarat ambang batas pencalonan (20% kursi DPRD atau 25% suara sah), optimalisasi mesin partai, dan upaya saling memperkuat basis dukungan elektoral antar wilayah. Dalam konteks ini, koalisi bukan sekadar hasil kalkulasi rasional partai politik semata, melainkan juga merupakan produk dari relasi kuasa yang dimediasi oleh aktor lokal yang memiliki pengaruh kuat di tataran sosial, ekonomi, dan politik. Peran Hamartoni Ahadis sebagai *local strongman* diwujudkan melalui tiga dimensi utama: (1) kapasitas administratif dan birokratik, yang memungkinkan dirinya menjangkau serta mengorganisir dukungan dari kalangan ASN dan tokoh masyarakat; (2) akses dan hubungan politik vertikal-horisontal, yang menjadikan dirinya aktor penghubung antara elite lokal dan elite partai di tingkat pusat; serta (3) kapabilitas sosial-kultural, yang memberinya legitimasi di tengah masyarakat Lampung Utara melalui relasi historis dan afiliasi adat.

Keberhasilan hilirisasi koalisi ini tampak dari meningkatnya popularitas pasangan calon nomor urut 2 (Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela) pasca terjalannya dukungan dari Hamartoni Ahadis dan jejaringnya. Survei elektabilitas di Lampung Utara menunjukkan

lonjakan signifikan dalam waktu dua bulan sejak deklarasi koalisi, yang mengindikasikan efektivitas dari kerja politik berbasis local strongman. Selain itu, pendekatan simultan antara Pilbup dan Pilgub membuka ruang bagi strategi “koalisi bertingkat” yang mempermudah konsolidasi tim pemenangan, logistik kampanye, serta manajemen isu di lapangan. Dari perspektif manajemen pemerintahan dan studi kebijakan, kasus ini menunjukkan bahwa local strongman dapat memainkan fungsi policy broker dalam politik lokal, yaitu menjadi aktor yang mampu menyatukan berbagai kepentingan kelembagaan dan jaringan informal untuk mencapai tujuan politik bersama. Ini penting dalam konteks Indonesia, di mana struktur partai politik belum sepenuhnya mapan dan seringkali bergantung pada figur sentral dalam membangun koalisi yang stabil.

Namun demikian, peran local strongman juga mengandung ambiguitas. Di satu sisi, ia dapat memperkuat demokratisasi lokal melalui mobilisasi partisipasi dan stabilisasi koalisi, tetapi di sisi lain juga berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan informal yang mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan personal. Dalam konteks ini, perlu dilakukan penguatan institusi partai politik agar keberadaan local strongman tidak menjadi satu-satunya penentu dinamika politik lokal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hilirisasi koalisi partai pada Pilkada Gubernur Lampung 2024 merupakan hasil dari integrasi antara kekuatan struktural partai politik dan kekuatan aktor lokal yang memiliki legitimasi kuat di tingkat masyarakat. Peran local strongman, seperti yang ditunjukkan oleh Hamartoni Ahadis, tidak hanya bersifat simbolik tetapi substantif dalam menggerakkan struktur koalisi, mendefinisikan strategi pemenangan, dan memediasi hubungan antar aktor politik. Temuan ini memperkaya studi tentang politik lokal dan koalisi partai, serta memberikan rekomendasi penting bagi pengembangan tata kelola demokrasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan di daerah.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Agung, A. C. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Lex Administratum*, VI(4), 21–28.
- As'ad, M. U., Barsihanor, B., Sobirin, S., & Hergianasari, P. (2023). Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Efriza, E. (2018). Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3(2), 733–750. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v3i2.470>
- Handoko, T., Darmansyah, R., & Syofian. (2020). Fenomena Local Strongman. *Moderat*, 6(3), 655–664. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3447/3268>
- Pinem, W., Arpani, P., & Nurainun. (2024). Pengelolaan Pilkada Pada Sistem Multipartai: Sebuah Tinjauan Terhadap Pelembagaan Partai Politik. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 203–222. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1188>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota